

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Konstitusi tahun 1999, Venezuela merupakan negara Republik Federal yang menganut sistem pemerintahan Unikameral, di mana hanya terdapat satu Majelis Nasional dalam Parlemen. Republik Bolivarian Venezuela mengadopsi sistem demokrasi liberal multi partai, dan melakukan pemilu Presiden berkala setiap 6 tahun sekali dengan melibatkan partisipasi politik dari masyarakat. Pemilihan Presiden terakhir dilakukan tahun 2012 dan dijadwalkan melakukan pemilu mendatang di tahun 2018, sedangkan pemilu yang dilakukan pada April tahun 2013 merupakan pemilihan Presiden untuk menggantikan kepemimpinan Presiden Chavez yang meninggal pada bulan Maret (CNN, 2017).

Terdapat dua blok utama partai politik di Venezuela, pertama blok dari kelompok sayap kiri berideologi sosialis dengan partai utamanya adalah Partai Sosialis Venezuela (PSUV). PSUV beraliansi dengan Partai Fatherland for All (PPT) dan Partai Komunis Venezuela (PCV). Kedua adalah blok Oposisi yang dikelompokkan ke dalam aliansi Mesa de la Unidad Democratica (MUD). Partai Era Baru (UNT) yang bersekutu bersama Proyek Venezuela, *Justice First* (PJ), dan Partai Movement toward Socialism (MAS), merupakan beberapa partai sayap kanan yang berada dalam aliansi Oposisi (Venezuelanalysis, n.d.). Aliansi dari

PSUV dan aliansi MUD inilah yang menjadi kelompok berseteru dalam memperebutkan kekuasaan Parlemen Venezuela di tahun 2013-2017.

Pelantikan Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela tahun 2013 menjadi momentum penting dalam pergerakan Oposisi. Kegagalan Maduro dalam menjalankan pemerintahan telah membuat pemerintah Venezuela mengalami krisis ekonomi dan politik. Kegagalan Maduro dalam memimpin Venezuela dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok Oposisi untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya, koalisi Oposisi dalam aliansi Persatuan Demokrasi (MUD), berhasil menguasai Badan Legislatif Venezuela dengan menjadi mayoritas dalam pemilu Majelis Nasional, setelah dua dekade dikuasai oleh koalisi sayap kiri, PSUV (Renwick, 2017). Kekuatan baru Oposisi yang mulai menguasai Parlemen Venezuela membuat posisi Maduro terdesak.

Pada tahun 2017, Maduro berencana mengganti Majelis Nasional dengan membentuk Majelis Konstituante, di mana Majelis Konstituante akan memiliki kekuasaan tak terbatas dan menciptakan pemerintahan baru yang lebih otoriter (Coyer, 2017). Pembentukan Majelis Konstituante merupakan cara Maduro untuk mencegah Oposisi semakin berkuasa dalam politik dalam negeri Venezuela. Pemilihan umum untuk mengisi 545 kursi pada jabatan Majelis Konstituante dilaksanakan pada 30 Juli 2017. Data analisis menyebutkan lebih dari 70% masyarakat menentang pembentukan Majelis Konstituante, namun Maduro tetap melaksanakannya. Maduro melakukan klaim sepihak atas hasil suara pada pemilu Majelis Konstituante, di mana total 545 kursi diisi oleh orang-orang dari koalisi sayap kiri di bawah naungan PSUV (BBC, 2017).

Tiga bulan setelah pemilu Majelis Konstituante, pemerintah Venezuela mengadakan pemilihan Kepala Negara Bagian (Gubernur). Jajak pendapat menunjukkan bahwa Oposisi akan memenangkan lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan 23 kursi. Jajak pendapat dari Datanalisis juga menunjukkan bahwa kandidat dari Oposisi memperoleh suara sekitar 62%, suara, sedangkan kandidat dari PSUV hanya memperoleh 21% suara (Brodzinsky, 2017). Kemenangan koalisi Oposisi dalam pemilu Parlemen dan negara bagian menunjukkan bahwa pengaruh Oposisi dalam politik dalam negeri Venezuela semakin kuat. Menguatnya pengaruh koalisi Oposisi dalam perpolitikan di Venezuela tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat terhadap kelompok Oposisi.

Selain itu, kekacauan politik dan ekonomi yang menyebabkan kondisi dalam negeri Venezuela tidak stabil dan memberi celah bagi Oposisi untuk memanfaatkan situasi. Maduro kehilangan kepercayaan masyarakat akibat kondisi ekonomi yang lemah dan ketidakstabilan politik. Harga minyak menurun serta inflasi yang melonjak sebesar 800% menyebabkan Venezuela berhutang sebesar 140 miliar US Dollar di awal tahun 2017. Kemiskinan semakin tinggi, serta akses kesehatan semakin sulit akibat pemerintahan Maduro yang menghalangi upaya kelompok Oposisi di Majelis Nasional dalam mencari bantuan internasional (Renwick, 2017). Kebangkitan Oposisi dalam perpolitikan di Venezuela tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih lanjut menganalisis latar belakang menguatnya pengaruh Oposisi dalam perpolitikan Venezuela.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Mengapa pengaruh Oposisi dalam Parlemen Venezuela tahun 2013-2017 menjadi semakin kuat?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui seperti apa dinamika perpolitikan yang terjadi di Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro.
2. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh Oposisi dalam perpolitikan di Venezuela.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dari semakin kuatnya pergerakan Oposisi dalam perpolitikan di Venezuela.

I.4 SIGNIFIKANSI

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki sejarah menarik berkaitan dengan keberhasilan pemimpin dari kelompok sayap kiri, Hugo Chavez dalam mempertahankan kekuasaan di tengah persetujuan politik dengan kelompok Oposisi. Sebagian besar penelitian terkait Venezuela secara umum membahas mengenai kegagalan dari sistem pemerintahan Neoliberalisme di Venezuela sebelum tahun 1998, atau pun keberhasilan dari Revolusi Bolivarian Chavez. Tidak banyak kajian terkait Venezuela yang membahas mengenai kondisi pemerintahan Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro, terlebih secara spesifik membahas dinamika perpolitikan. Oleh karena itu, skripsi

ini akan menganalisis secara mendalam terkait isu perpolitikan di Venezuela pada tahun 2013-2017, dengan sudut pandang berbeda dari peneliti sebelumnya. Secara lebih mendalam penelitian ini akan melihat pertentangan antara pemerintah Maduro dengan kelompok Oposisi akan berpengaruh terhadap kondisi politik Venezuela.

I.5 CAKUPAN PENELITIAN

Penelitian mengenai Dinamika Politik dan Pengaruh Oposisi dalam Perpolitikan di Venezuela termasuk dalam lingkup kajian Politik dan Pemerintahan Venezuela. Lingkup perpolitikan dalam skripsi ini terfokus pada lembaga tinggi negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan ditunjang dengan perpolitikan di tingkat negara bagian. Kajian Politik Pemerintahan Venezuela yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kondisi ekonomi dan politik Venezuela dari tahun 2013-2017, di mana telah terjadi pertentangan politik antara kubu pemerintah Maduro dengan kubu koalisi Oposisi. Kondisi domestik Venezuela yang tengah kacau kemudian membuat pemerintah Venezuela mendapat kritik dari dunia Internasional, hingga campur tangan Amerika Serikat dan OAS yang dimanfaatkan oleh Oposisi hingga mampu memberi celah bagi Oposisi untuk mlemahkan kekuasaan Maduro. Dinamika politik dalam negeri Venezuela dan campur tangan asing yang membuat pengaruh Oposisi dalam perpolitikan menjadi semakin kuat juga akan melengkapi pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

1.6 KAJIAN PUSTAKA

Kajian terkait Venezuela dapat dilihat dari berbagai artikel maupun jurnal, diantaranya adalah artikel dari Andrés Antillano, Iván Pojomovsky, Verónica Zubillaga, Chelina Sepúlveda, dan Rebecca Hanson. Artikel berjudul “*The Venezuelan prison: from Neoliberalism to the Bolivarian revolution*” secara garis besar membahas mengenai sistem hukum yang ada di Venezuela mulai dari masa Neoliberalisme hingga pada masa Revolusi Bolivarian. Beberapa data dari artikel ini menunjukkan bahwa setelah Revolusi Bolivarian diterapkan, kebijakan redistributif, peraturan ekonomi dan strategi inklusi sosial menjadi semakin kuat. Jurnal yang ditulis oleh Rebecca dan kawan-kawan memetakan dampak kebijakan Chavez yang pro masyarakat terhadap kaitannya dengan hubungan sosial di dalam sistem penjara (Andrés Antillano, 2015, pp. 197-198). Pembahasan dalam artikel sangat runtut dan terperinci, hanya saja tidak semua bagian dalam pembahasan dijelaskan secara lebih mendalam. Contohnya pada penjelasan mengenai kesejahteraan masyarakat Venezuela ketika masa Neoliberal, hanya secara umum dibahas dalam jurnal ini. Penelitian yang ditulis oleh Rebecca dan kawan-kawan lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam sistem di penjara pada masa Neoliberalisme.

Pembahasan lain terkait kajian politik pemerintahan Venezuela terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Kurt Weyland pada tahun 2013. Jurnal yang ditulis oleh Weyland secara umum justru membahas mengenai pergerakan sayap kiri di Amerika Latin. Weyland tidak secara spesifik membahas pergerakan sayap kiri pada salah satu negara di kawasan Amerika Latin, akan tetapi dari beberapa negara, termasuk Venezuela. Artikel yang berjudul *The Threat From the Populist*

Left membahas dari segi perpolitikan di Amerika Latin mulai dari Venezuela, Bolivia, Ekuador dan beberapa negara lain yang menyoroti pada kebangkitan sayap kiri pada negara-negara tersebut di akhir tahun 1990-an. Salah satu bukti kebangkitan sayap kiri di Amerika Latin yang dipaparkan Weyland dalam penelitiannya yaitu dengan terpilihnya Hugo Chavez dalam pemilu tahun 1998. Selain pembahasan utama, permasalahan ekonomi maupun kehidupan siosial masyarakat hanya menjadi gambaran kecil dalam penelitian Weyland.

Kurt Weyland menjelaskan bahwa dominasi sayap kiri di Amerika Latin membuat kontrol yang ketat terhadap pemerintahan di bawah kekuasaan sayap kiri. Secara tidak langsung dalam tulisannya, Weyland menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sayap kiri dalam mengontrol pemerintahan tersebut justru berdampak baik untuk mengurangi kesewenang-wenangan. Weyland juga menguak berbagai kecurangan yang dilakukan oleh sayap kiri untuk tidak memberi celah bagi sayap kanan dalam menguasai pemerintahan (Weyland, 2013, pp. 20-23). Data yang disajikan oleh Weyland bukan saja dari sisi kelebihan sayap kiri dalam mengatur pemerintahan, namun juga kekurangannya, yang kemudian oleh Weyland dibandingkan perbedaan antara pergerakan kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Akan tetapi pembahasan Weyland tidak spesifik pada satu negara sehingga pembahasannya tidak diteliti secara mendalam, padahal permasalahan dari satu negara dengan negara lain berbeda, meskipun negara tersebut sama-sama tengah menghadapi kebangkitan dari sayap kiri.

Berbeda dari artikel Kurt Artikel Carlos De La Torre yang berjudul “*Left-wing Populism: Inclusion and Authoritarianism in Venezuela, Bolivia, and Ekuador*” membahas mengenai janji kampanye dari kelompok sayap kiri terkait

dengan demokrasi partisipatif, pemberantasan korupsi, dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Venezuela, Bolivia, dan Ekuador. Hasil pembahasan Carlos menunjukkan bahwa kemenangan sayap kiri di Venezuela, Bolivia, dan Ekuador justru tidak mampu mengimplementasikan adanya demokrasi partisipatif dan juga memberantas korupsi yang dilakukan oleh para kaum elit pemerintah. Pemerintahan yang dijalankan justru mengarah pada otoritarisme dari sayap kiri. Kegagalan Neoliberalisme dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan politik yang ada di ketiga negara tersebut, mampu menarik perhatian masyarakat melalui janji kampanye yang dianggap sebagai alternatif baru bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik oleh kelompok sayap kiri (Torre, 2016, p. 6). Artikel yang ditulis Carlos memiliki alur pembahasan yang runtut dan jelas, disajikan dengan menarik, serta data yang bervariasi. Kekurangan Carlos adalah, tidak memaparkan keberhasilan maupun kegagalan program dari kelompok sayap kiri di masing-masing negara.

Kajian terkait demokrasi partisipatif di Era Hugo Chavez juga ditulis oleh Gabriel Hetland, dalam artikelnya berjudul "*The Crooked Line: From Populist Mobilization to Participatory Democracy in Chávez-Era Venezuela*". Penelitian Hetland membahas mengenai partisipasi dari kelompok populis dalam implementasi demokrasi partisipatif di Venezuela. Salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam artikel Gabriel adalah mengenai mobilisasi kaum populis dan demokrasi partisipatif Venezuela di era Chavez. Gabriel memaparkan bahwa Chavez merupakan satu-satunya Presiden yang tidak memperkenalkan demokrasi partisipatif, yang sejak tahun 1960-an dilakukan oleh pemimpin Venezuela. Kemenangan Chavez dalam pemilu tahun 1998 justru dianggap sebagai krisis

demokrasi dikarenakan muncul dari dukungan partai. Chavez membawa demokrasi model baru, yaitu demokrasi sosialis yang justru menjadikan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat menjadi tidak partisipatif (Hetland, 2014). Pembahasan mengenai populisme yang ditulis oleh Gabriel termasuk isu yang jarang diteliti, dan Gabriel memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai populisme di era Chavez, hanya saja alur pembahasannya tidak runtut, terbagi-bagi, dan justru meluas. Gabriel membahas populisme di masa Torres dan Sucre dalam satu sub Bab pembahasan tersendiri, sehingga bahasan utama yang seharusnya diteliti menjadi sulit untuk difahami alurnya.

Lain halnya dengan artikel yang ditulis oleh Javier Corrales and Michael Penfold berjudul "*Venezuela: Crowding Out The Opposition*". Corrales dan Penfold menjelaskan kuatnya kontrol politik Chavez pada tahun 2000-an yang membuat oposisi merasa dikucilkan dalam perpolitikan Venezuela. untuk melemahkan kekuatan kelompok Oposisi dalam perpolitikan Venezuela, Chavez melakukan kecurangan agar koalisi PSUV dapat memenangkan pemilu Majelis Nasional pada tahun 2005 (Penfold, 2007, pp. 100-103). Kelebihan dari artikel Corrales dan Penfold adalah, di mana penjelasan yang diberikan sangat rinci, dan isu yang dibahas sangat jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan dari dalam artikel, akan tetapi sudut pandang yang digunakan oleh Corrales dan Penfold adalah dari sisi PSUV sehingga untuk Oposisi kurang begitu ditekankan.

Penelitian ini akan mencoba melakukan analisis yang berbeda, di mana penulis akan mengkaji secara spesifik dan mendalam mengenai dinamika

perpolitikan Venezuela dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan melihat kondisi pemerintahan Venezuela. Mulai dari kondisi ekonomi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, hingga pertentangan politik dari pemerintah berkuasa di bawah kepemimpinan Maduro menghadapi kelompok Oposisi.

1.7 LANDASAN TEORI

The Political System Theory

Setelah Perang Dunia II, David Easton mencoba membangun sebuah Sistem Politik yang sistematis dengan melakukan penelitian yang mendalam. Menurut Easton, Sistem Politik merupakan segala kegiatan yang teridentifikasi dan saling terkait di dalam masyarakat yang membuat masyarakat terikat dengan nilai-nilai dari alokasi otoritatif yang ada (Easton, 1995, pp. 24-25). Kegiatan-kegiatan lain di luar Sistem Politik diartikan Easton sebagai variabel Environment (Lingkungan). The Environment dalam skema Sistem Politik Easton terdiri dari segala kejadian seperti sistem sosial dan ekonomi yang ada diluar dari Sistem Politik yang akan berperan dalam proses Inpu-Output pada Sistem Politik. Lingkungan dapat mempengaruhi Sistem Politik dan begitu pun sebaliknya, di mana Lingkungan tersebut dapat berupa Lingkungan Domestik maupun Internasional (Easton, 1965, pp. 72-73). Teori Sistem Politik akan banyak berbicara tentang proses saling terkait dan tanpa henti antara Input, Output, dan Feedback.

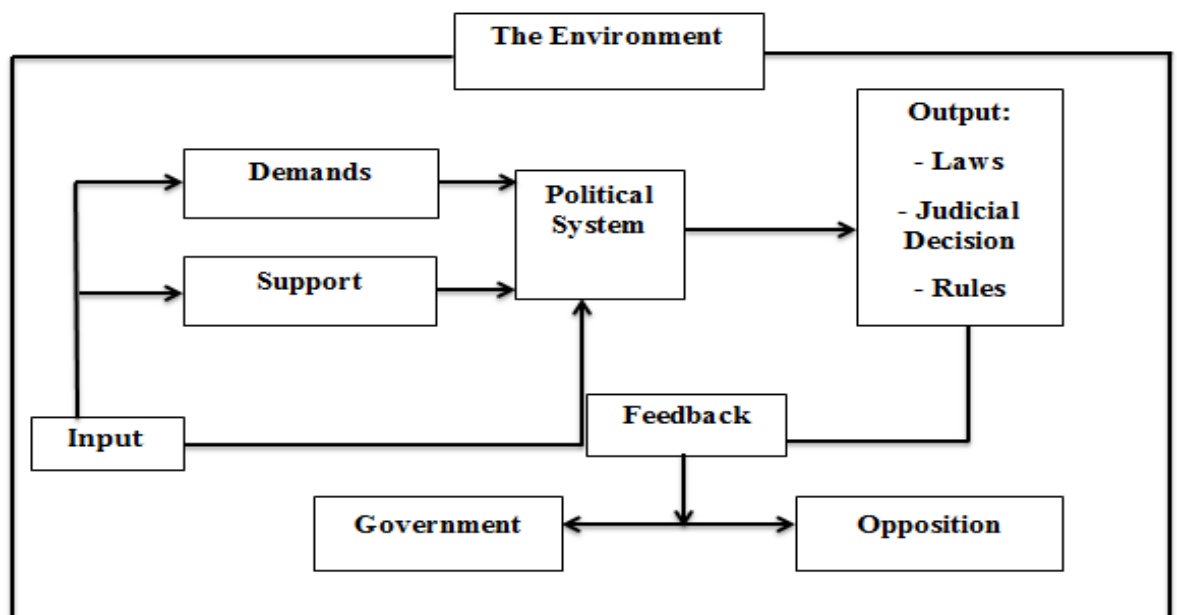
1. Easton membedakan Input atas *Demands* dan *Support* sebagai tanggapan dari adanya Feedback. *Demands* merupakan tindakan dari individu

maupun kelompok untuk memaksakan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Sedangkan *Support* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk merespon adanya *Demands* supaya individu maupun kelompok mematuhi.

2. *Output* dari Sistem Politik diantaranya termasuk hukum, keputusan pengadilan, aturan, dan sejenisnya yang dianggap sebagai alokasi dari nilai otoritatif berbentuk kebijakan publik (Easton, 1995, pp. 90-98).
3. *Feedback* mengindikasikan bahwa kebijakan publik pada *Output* dapat memunculkan tanggapan yang berbeda (Easton, 1995, pp. 127-130)

Oleh karena itu, penulis menggunakan Teori Sistem Politik untuk mendukung argument dalam penelitian ini. Agar lebih mudah dalam memahami keterkaitan dari masing-masing proses yang ada dalam Sistem Politik, maka dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar I.1. Model Skema dari Sistem Politik

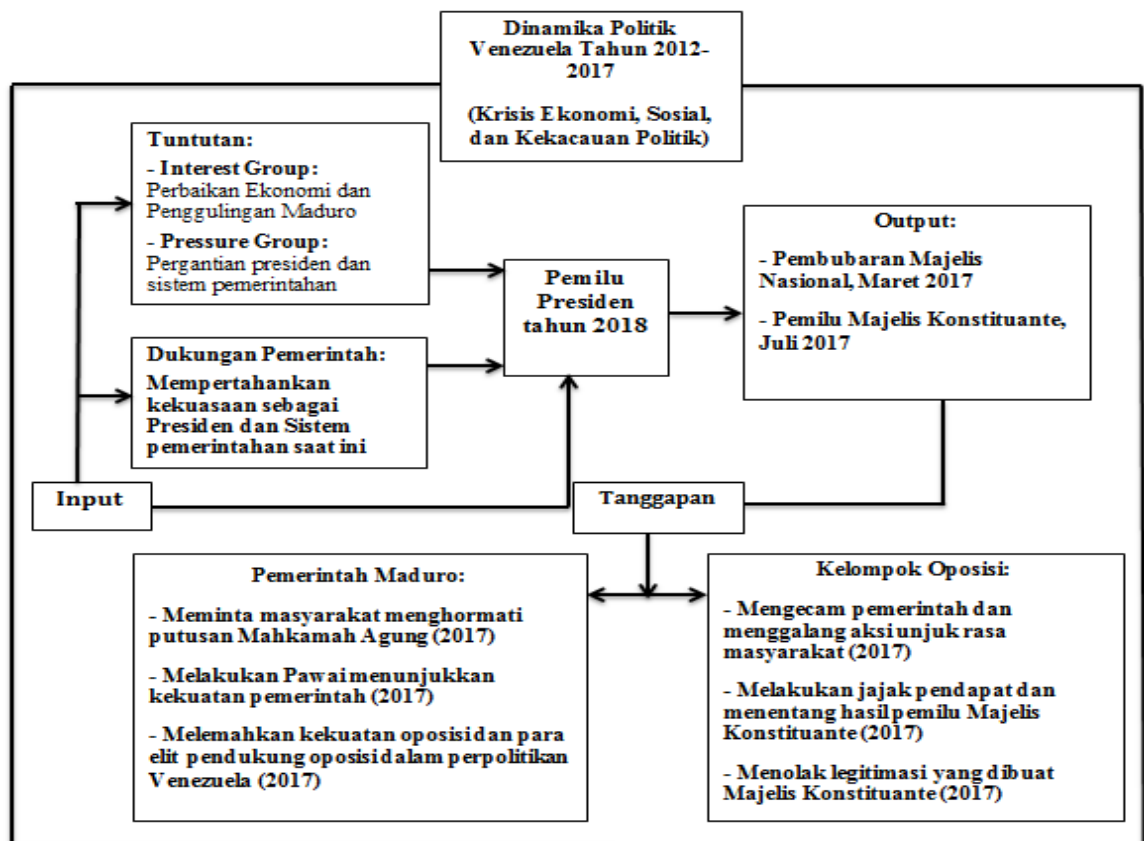


Sumber:(Easton, 1965, p. 32)

Skema di atas menunjukkan bagaimana setiap proses yang ada di dalam Sistem Politik berpengaruh pada proses berikutnya. Sistem Politik lah yang akan menjadi konversi dari Input menuju Output, begitu seterusnya. Masing-masing poin dalam Sistem Politik dapat menjadi kunci utama untuk memulai sebuah proses, tergantung pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi.

Berdasarkan penjelasan David Easton maka, Teori ini tepat digunakan untuk menjelaskan latar belakang mengapa pengaruh Oposisi menjadi semakin kuat dalam perpolitikan di Venezuela pada tahun 2013-2017. Melalui skema Sistem Politik Easton, akan diketahui faktor-faktor yang membuat Oposisi semakin kuat. Keterkaitan Teori dengan latar belakang permasalahan dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar I.2. Penerapan Masalah dalam Skema Teori Sistem Politik



Penjelasan Terkait Penerapan Skema terhadap Permasalahan

Perlu untuk diketahui bahwa perselisihan antara kelompok sayap kanan di bawah koalisi Oposisi (MUD) dan koalisi sayap kiri PSUV di Venezuela memiliki sejarah panjang. Sama halnya seperti perselisihan antara sayap kiri dan sayap kanan di setiap negara, masing-masing kelompok saling menjatuhkan dikala kondisi pemerintahan memburuk. Keberhasilan Chavez menjadi presiden dari golongan sayap kiri ter lama di Venezuela membuat Oposisi harus berusaha keras untuk bisa mengambil alih tampu kepemimpinan. Kuatnya politik Chavez juga membuat langkah Oposisi dalam menjegal Chavez selalu gagal. Setelah Chavez meninggal dan kekuasaan beralih ke tangan Maduro, kondisi dalam negeri Venezuela semakin tidak stabil. Hal tersebut menjadi celah bagi Oposisi untuk kembali memperkuat pengaruhnya dalam perpolitikan di Venezuela.

Kondisi domestik pemerintahan Venezuela, dalam Teori Sistem Politik Easton diartikan sebagai The Environment. Semenjak kematian Chavez pada tahun 2013, kondisi ekonomi dan perpolitikan di Venezuela semakin kacau. Hutang luar negeri meningkat dan menyebabkan lonjakan inflasi, hingga terjadi krisis berkepanjangan di Venezuela. Harga minyak yang jatuh membuat kondisi perekonomian semakin buruk, dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat miskin di Venezuela. Unjuk rasa sering mewarnai pemerintahan Venezuela dibawah kepemimpinan Nicolas Maduro. Perseteruan antara pemerintah Maduro dan Oposisi membuat masyarakat terpolarisasi atas kubu dukungan. Di satu sisi, campur tangan Amerika Serikat semakin memperkeruh kondisi politik dan pemerintahan Venezuela yang sedang kacau.

Pada tahun 2014, melalui Undang-undang HAM dan Masyarakat Sipil, Amerika Serikat memberi sanksi kepada pemerintah Venezuela. Sanksi tersebut diberikan atas tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Venezuela ketika membubarkan para demonstran anti pemerintah pada Februari 2014 (Committee, 2014). Sanksi dari Amerika Serikat dimanfaatkan oleh Oposisi untuk meningkatkan dukungan masyarakat menjelang pemilu Majelis Nasional tahun 2015. Dukungan masyarakat berhasil membuat Oposisi menguasai lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan anggota Badan Legislatif. Kekuasaan yang dimiliki Oposisi dalam Majelis Nasional membuat kedudukan Maduro semakin terancam.

Kondisi pemerintahan Venezuela yang tidak stabil akibat krisis ekonomi, sosial, dan politik secara tidak langsung telah melemahkan dukungan masyarakat terhadap Maduro. Kemenangan Oposisi dalam Majelis Nasional menunjukkan bahwa dukungan masyarakat telah beralih kepada pihak Oposisi. Dukungan besar dari masyarakat terhadap Oposisi membuat langkah Maduro dalam menyingkirkan Oposisi menjadi semakin sulit. Setelah menguasai Majelis Nasional, Koalisi Oposisi (MUD) mencoba menjegal Maduro melalui referendum, dan menolak memberikan Maduro untuk mengeluarkan dekret. Akibat dari tindakan Oposisi dalam menjatuhkan Maduro melalui Majelis Nasional, Maduro mengambil langkah dengan menghapus Majelis Nasional melalui keputusan Mahkamah Agung pada Maret 2017.

Maduro meminta masyarakat Venezuela untuk menghormati keputusan dari Mahkamah Agung, akan tetapi respon berbeda datang dari pihak Oposisi. Sebagai pihak yang dirugikan, Oposisi mengecam keras tindakan Mahkamah

Agung dan menyuarkan aksi demonstrasi bagi masyarakat. Unjuk rasa besar penolakan masyarakat Venezuela terhadap pembubaran Majelis Nasional akhirnya membuat Maduro menyerah. Unjuk rasa masyarakat yang berjalan beberapa hari akhirnya memaksa Mahkamah Agung mencabut kembali keputusan untuk membubarkan Majelis Nasional beberapa hari kemudian (VOA, 2017).

Menguatnya pengaruh Oposisi dalam perpolitikan di Venezuela membuat Maduro perlu melakukan usaha lain untuk menjatuhkan Oposisi. Kegagalan Maduro menyingkirkan Oposisi melalui keputusan Mahkamah Agung tidak membuat Maduro menyerah. Satu bulan setelah percobaan pembubaran Majelis Nasional, pemerintah Maduro mengumumkan pembentukan Majelis Konstituante yang akan dilaksanakan akhir bulan Juli 2017 (VOA, 2017). Pembentukan Majelis Konstituante kembali memicu respon dari pihak pemerintah dan Oposisi. Masyarakat Venezuela yang tidak setuju dengan pembentukan Majelis Konstituante melakukan unjuk rasa berbulan-bulan sejak kabar tersebut diumumkan (BBC, 2017). Namun, Maduro justru melakukan klaim sepihak atas kemenangan mutlak kelompok sayap kiri dibawah koalisi PSUV sebagai anggota Majelis Konstituante (VOA, 2017).

Tindakan Maduro tersebut memicu kemarahan dari pihak Oposisi yang semakin geram dengan cara yang dilakukan pemerintah Maduro. Oposisi yang sejak awal menolak pembentukan Majelis Konstituante melakukan boikot sebelum perhitungan suara, dan melakukan jajak pendapat menolak hasil pemilu dan menolak segala bentuk legitimasi yang dibuat oleh Majelis Konstituante. Sedangkan, Maduro menanggapi kemenangan PSUV dalam Majelis Konstituante dengan mulai menyingkirkan satu persatu elit Oposisi dalam perpolitikan

Venezuela. Pihak Oposisi ingin agar Maduro segera turun jabatan dan sistem pemerintahan Venezuela segera diganti. Akan tetapi, pihak Maduro menegaskan bahwa sistem pemerintahan Venezuela akan tetap sejalan dengan cita-cita dan nilai luhur Bolivarian yang telah diperjuangkan oleh Chavez.

I.8 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif melalui sebuah Studi Literatur. Berdasarkan pengertiannya penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik itu tertulis maupun lisan yang didapat melalui pencarian data dari hasil tulisan orang lain maupun data dari sebuah wawancara. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diantaranya seperti data laporan resmi yang dikeluarkan dari badan-badan resmi pemerintah, World Bank, IMF, dan PBB. Sedangkan untuk sumber sekunder didapat dari bahan bacaan seperti Buku, Jurnal, Artikel, dan sumber berita yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis peningkatan pengaruh dari Oposisi Venezuela merupakan riset yang berbentuk deskriptif, sehingga metode kualitatif tepat digunakan dalam riset ini.

I.8.1. SUBJEK PENELITIAN

Terdapat dua subjek dalam penelitian skripsi ini, pertama adalah pihak pemerintah berkuasa di bawah kepemimpinan Maduro (Pemerintah Maduro), kedua adalah pihak koalisi Oposisi (MUD) sebagai kelompok yang ingin menjatuhkan Maduro.

I.8.2.PROSES PENELITIAN

Proses penelitian merupakan tahapan dalam pengerjaan skripsi mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, riset, hingga pencapaian. Proses dalam penelitian akan berguna sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pra Riset

Sebelum memulai melakukan penelitian, peneliti mencari tahu perkembangan politik, maupun isu-isu yang berkembang di Venezuela pada tahun 2013-2017. Tahap awal dari penelitian kualitatif yaitu Kajian Literatur, di mana Kajian Literatur dalam skripsi ini akan digunakan untuk melihat sisi unik dari skripsi yang akan dibahas, sekaligus untuk membuktikan bahwa skripsi yang akan ditulis merupakan isu yang belum pernah dibahas sebelumnya, ataupun isu yang sudah pernah dibahas sebelumnya namun memiliki variabel yang berbeda dari penelitian lain.

2. Pengambilan Data

Tahap berikutnya penelitian skripsi dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data sekunder bersumber dari Buku, Jurnal, Jurnal Artikel, Report resmi dari suatu Negara, dan Berita dari berbagai website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maupun yang lainnya. Data tersebut akan dijadikan sebagai bahan pendukung dari setiap pembahasan maupun argumen dari penulis, sekaligus untuk memperkuat bukti dari penelitian skripsi yang ditulis.

3. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, tahap selanjutnya yaitu dilakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai macam data untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Analisis data dilakukan dengan mengamati hipotesa awal dalam penelitian dengan fakta dan data yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara argumen dalam penelitian terhadap rumusan masalah. Sehingga kemudian dapat disimpulkan apakah hipotesa awal dalam penelitian yang dilakukan telah menjawab pertanyaan penelitian, ataukah justru bertentangan, disertai dengan data analisis yang telah dilakukan.